



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Strategi Penyiapan Aparat Komando Kewilayahan (Kowil) dalam Operasi Teritorial Pada Operasi Gabungan TNI di Wilayah Kodam II/Sriwijaya

**Abdillah Arif<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan, [Abdillah\\_arif@gmail.com](mailto:Abdillah_arif@gmail.com)

Corresponding Author: [Abdillah\\_arif@gmail.com](mailto:Abdillah_arif@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to analyze the strategy for preparing Territorial Command Apparatus (Kowil) in territorial operations carried out by the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the Kodam II/Sriwijaya region. The research employs a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the strategies implemented include intensive training in the field of Territorial (Devotion to the Indonesian Armed Forces (Bhakti TNI), Social Communication (Komsos), and Regional Defense Training (Binwanwil)), enhancement of inter-agency cooperation, and the use of information technology to support communication and coordination. Additionally, community participation is considered crucial for the success of territorial operations. This study provides recommendations for further development in preparing Kowil apparatus in order to optimize their tasks and functions.*

**Keyword:** *Strategy, Preparation, Regional Command Apparatus (Kowil), Territorial Operations, Joint Operations of the Indonesian National Armed Forces (TNI), Kodam II/Sriwijaya Region.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyiapan Aparat Komando Kewilayahan (Kowil) dalam operasi teritorial yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kodam II/Sriwijaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi pelatihan intensif dibidang Teritorial (Bhakti TNI, Komunikasi Sosial (Komsos) dan Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil), peningkatan kerja sama antar institusi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam keberhasilan operasi teritorial. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam penyiapan aparatur Kowil agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan gelar kekuatan TNI Terpadu, Mengamankan Ibukota Nusantara, Wilayah Kodam VI/Mulawarman

## PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pertahanan negara Indonesia yang belandaskan pada Sistem Pertahanan Semesta yang salah satunya bercirikan kewilayahan, peran Aparat Komando Kewilayahan (Kowil) menjadi sangat penting, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas operasi teritorial. Strategi penyiapan Kowil diharapkan mampu menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk itu diharapkan dalam penyiapan aparat Kowil dapat dilaksanakan melalui pelatihan yang intensif dan terstruktur di bidang teritorial, yang mencakup Bhakti TNI, Komunikasi Sosial (Komsos), dan Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kowil, koordinasi yang efektif antara Kowil dengan instansi terkait didukung oleh adanya partisipasi masyarakat terhadap operasi teritorial yang diselenggarakan oleh Kowil jajaran Kodam II/Swj pada penyelenggaraan operasi gabungan TNI. Penelitian ini berfokus pada strategi penyiapan Aparat Komando Kewilayahan (Kowil) dalam melaksanakan operasi teritorial di wilayah Kodam II/Sriwijaya, mengingat perannya yang semakin penting dalam konteks Sistem Pertahanan Semesta Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Setiawan (2020) yang mengkaji efektivitas pelatihan aparat TNI dalam konteks operasi kemanusiaan, sementara penelitian Prasetyo (2021) menyoroti strategi kolaborasi TNI dan masyarakat dalam operasi teritorial di wilayah konflik. Rachmawati (2022) fokus pada integrasi strategi teritorial dalam operasi gabungan TNI-POLRI. Penelitian ini menambahkan dimensi yang berbeda dengan mengeksplorasi kewilayahan dan tantangan spesifik dalam penyiapan Kowil sebagai aspek integral dari sistem pertahanan. Sementara penelitian sebelumnya menekankan efektivitas pelatihan, kolaborasi antar institusi, dan manajemen konflik, penelitian ini mengkaji secara komprehensif tantangan yang lebih luas, termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan antar institusi, dan keterlibatan masyarakat yang belum optimal. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang memadukan aspek pelatihan, koordinasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat dalam satu kesatuan.

Faktanya, pelaksanaan penyiapan aparat Komando Kewilayahan (Kowil) di wilayah Kodam II/Sriwijaya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu keterbatasan Sumber Daya, baik anggaran maupun personel yang menghambat optimalisasi pelatihan dan efektivitas operasi teritorial, perbedaan kepentingan antar Institusi, yang dapat menimbulkan konflik dan menghambat sinergi dalam pelaksanaan program, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal sehingga efektivitas operasi teritorial yang dilaksanakan Kowil menjadi berkurang.. Penelitian ini akan menganalisis strategi penyiapan Kowil yang mencakup pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan aparat, peningkatan kerja sama antar institusi untuk meminimalkan bentrokan kepentingan, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara Kowil dan masyarakat, serta memberikan gambaran holistik tentang strategi penyiapan Kowil dalam operasi teritorial di wilayah Kodam II/Sriwijaya dengan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kolaborasi antara TNI dan masyarakat di wilayah konflik. Menurut Bennett dan Elman (2006), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi faktor-faktor kontekstual dan interaksi sosial yang sulit diukur dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Makodam II/Sriwijaya, Makorem 044/Gapo dan Makodim 0418/Plg, Pemprov Sumatera Selatan, Kantor Walikota Palembang. Subjek Penelitian yaitu pejabat Aster Kasdam II/Swj, Danrem 044/Gapo, Dandim 0418/Plg yang terlibat dalam operasi teritorial, perwakilan anggota masyarakat yang berkolaborasi dengan TNI, serta pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan operasi teritorial TNI. Obyek pada penelitian ini yaitu Strategi Penyiapan Aparat Komando

Kewilayahan (Kowil) Dalam Operasi Teritorial Pada Operasi Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya.

Data akan dikumpulkan menggunakan Wawancara Mendalam. Menurut Creswell (2014), wawancara mendalam akan dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian dengan pertanyaan terbuka yang mendorong diskusi; Observasi Partisipatif. Observasi akan dilakukan selama kegiatan operasi teritorial untuk memahami interaksi dan kolaborasi secara langsung; (3) Studi Dokumentasi. Menganalisis dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait dengan operasi teritorial dan kolaborasi dengan masyarakat.

Data yang terkumpul akan diproses menggunakan teknik transkripsi, di mana wawancara dan hasil observasi akan dicatat dan diubah menjadi bentuk teks tertulis untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Teknik ini mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Creswell (2014). Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tahapan berikut: Pengumpulan Data. Mengumpulkan semua data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi; Pengurangan Data. Memilih informasi relevan dan menyusun data sesuai dengan fokus penelitian; Penyajian Data. Menyajikan data dalam bentuk grafik, narasi, atau tabel untuk memudahkan pemahaman; serta Penarikan Kesimpulan. Menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui kombinasi metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait penyiapan aparat Komando Kewilayahan (Kowil) di wilayah Kodam II/Sriwijaya. Berikut adalah temuan utama berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Kowil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

### Keterbatasan Sumber Daya

Dari hasil wawancara dengan sejumlah personel Kowil dan pemangku kepentingan lainnya, terungkap bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama yang signifikan dalam penyiapan Kowil. Keterbatasan sumber daya tersebut mencakup anggaran yang diterima seringkali tidak mencukupi untuk program pelatihan dan peningkatan kapasitas sehingga tidak dapat memfasilitasi semua personel yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau setiap wilayah tanggung jawab. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelatihan yang diharapkan tidak terakomodasi dengan baik, dan hanya sebagian kecil personel yang mendapatkan akses pelatihan yang memadai. Dokumentasi anggaran juga menunjukkan bahwa alokasi untuk program pengembangan Kowil terbilang minim dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Bila mengacu pada teori manajemen sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan oleh Armstrong dan penelitian terdahulu Setiawan (2020), maka terdapat beberapa point penting yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yaitu : pertama, Pendekatan Strategis dalam Manajemen SDM Aparat Kowil jajaran Kodam II/Swj. Armstrong menggarisbawahi bahwa manajemen SDM tidak hanya tentang merekrut dan mengelola personel, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks penyiapan aparat Kowil di wilayah Kodam II/swj, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan minimnya program pelatihan dapat dilihat sebagai kelemahan dalam pendekatan strategis manajemen SDM. Tanpa pelatihan yang memadai, personel Kowil tidak dapat memenuhi tuntutan yang diharapkan, yang dapat menghambat efektivitas operasional di lapangan.

Kedua, Pengelolaan Sumber Daya untuk Pengembangan Kapasitas. Keterbatasan sumber daya di Kowil jajaran Kodam II/Swj mencakup anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan. Armstrong (2014) menyatakan bahwa organisasi perlu berinvestasi dalam pengembangan SDM untuk

memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Dengan tidak terakomodasinya banyak program pelatihan, Kowil kehilangan peluang untuk meningkatkan keterampilan personelnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi kinerja dan efektivitas dalam operasi teritorial yang telah diprogramkan.

Ketiga, Dampak pada Performa Organisasi Kowil. Minimnya program pelatihan berpotensi mengakibatkan sebagian besar personel tidak siap menghadapi tantangan yang ada, sehingga mengurangi kinerja organisasi. Armstrong menekankan bahwa pelatihan merupakan elemen penting dalam pengembangan SDM yang dapat berdampak positif pada motivasi dan kepuasan kerja. Ketika personel merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan, hal ini dapat menyebabkan demotivasi, penurunan moral, dan tingginya tingkat pergantian pegawai. Situasi ini semakin memperburuk kondisi Kowil yang sudah mengalami keterbatasan sumber daya.

Pada penelitian terdahulu oleh Setiawan (2020) menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan yang terstruktur memiliki dampak signifikan terhadap keterampilan dan kinerja personel TNI dalam operasi kemanusiaan. Pelatihan yang terencana dan sistematis tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman personel tentang prosedur, nilai-nilai, dan strategi yang diperlukan saat berada di lapangan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Kowil, di mana keterbatasan sumber daya membatasi kemampuan untuk memberikan pelatihan yang komprehensif. Tanpa pelatihan yang terstruktur, personel Kowil mungkin tidak mampu memenuhi tuntutan situasi yang dihadapi saat melaksanakan tugas, yaitu : pertama, Keterkaitan Antara Pelatihan dan Kinerja. Setiawan menekankan bahwa ada hubungan langsung antara kualitas pelatihan dan kinerja di lapangan. Dalam konteks Kowil, hasil pelatihan yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya kinerja. Ketidakmampuan untuk merespons situasi darurat atau beradaptasi pada beban kerja yang tinggi dapat berakibat fatal, baik bagi personel itu sendiri maupun terhadap efektivitas misi yang diemban. Dengan melaksanakan pelatihan yang terstruktur, Kowil akan lebih mampu memastikan bahwa personel memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani operasi kemanusiaan dengan baik.

Kedua, Manajemen SDM dan Tantangan Ketersediaan Sumber Daya. Mengadopsi pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, seperti yang dijelaskan oleh Armstrong, sangat penting untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh Kowil. Armstrong menjelaskan bahwa pengelolaan SDM yang baik memperhatikan pengembangan dan peningkatan keterampilan personel. Dalam hal ini, Kowil dapat menerapkan model pelatihan yang lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Misalnya, menggunakan metode pelatihan berbasis teknologi dapat mengurangi biaya dan memperluas jangkauan kelompok yang dilatih.

Sesuai hasil analisis dari perspektif teori manajemen sumber daya manusia dari Armstrong dan penelitian terdahulu dari Setiawan (2020) pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya dapat dilakukan dengan meningkatkan manajemen SDM di Kowil jajaran Kodam II/Swj sebagai berikut : pertama, Meningkatkan Alokasi Anggaran. Mengajukan proposal untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Hal ini penting agar program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mencakup lebih banyak personel; kedua, Menyusun Rencana Pengembangan SDM Aparat Kowil yang Komprehensif. Membuat rencana pengembangan SDM yang mencakup analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi yang diperlukan di lapangan.

Ketiga, Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi. Berkolaborasi dengan instansi lain atau organisasi swasta untuk mendapatkan sumber daya tambahan, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas pelatihan; serta menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyedia pelatihan lainnya untuk mendapatkan materi pelatihan yang berkualitas tanpa perlu mengeluarkan anggaran besar; keempat, Mengimplementasikan Pelatihan Berbasis



Teknologi. Mempertimbangkan penggunaan pelatihan berbasis teknologi, seperti e-learning, yang memungkinkan lebih banyak personel untuk mengakses pelatihan dengan biaya yang lebih rendah; kelima, Implementasi Pembelajaran Berbasis Simulasi. Mengembangkan program pelatihan yang menekankan pada simulasi situasi nyata, sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang diajarkan dalam konteks operasi kemanusiaan; keenam, Pengukuran dan Evaluasi. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan yang diadakan untuk memahami dampaknya terhadap kinerja di lapangan dan melakukan perbaikan berkelanjutan; serta ketujuh, Menerapkan Program Mentoring. Menerapkan sistem mentoring di mana personel senior dapat membimbing yang lebih junior, meningkatkan pembelajaran dan transfer pengetahuan diantara anggota.

### **Perbedaan Kepentingan Antar Institusi**

Dari observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah daerah dan instansi terkait, ditemukan bahwa perbedaan kepentingan antar institusi sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan operasi teritorial. Terkadang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kota tidak sejalan dengan tindakan yang ingin dilaksanakan oleh Kowil jajaran Kodam II/Swj sehingga menciptakan kebingungan dan menambah beban dalam koordinasi. Dari dokumentasi rapat koordinasi yang ditinjau, terlihat bahwa keputusan yang diambil sering kali tidak seragam dan dapat menyebabkan konflik kepentingan. Kelemahan dalam komunikasi dan ketidakselarasan antara tujuan Kowil dan program pemerintah telah menjadi tantangan yang terus-menerus ada. Observasi juga menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pertemuan antara Kowil dan pemangku kepentingan lainnya tidak selalu optimal, menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan kolaborasi.

Dalam konteks kerja sama antar institusi, teori koordinasi antar institusi yang dikemukakan oleh Purnomo (2020) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara institusi yang berbeda sering kali menimbulkan hambatan yang signifikan. Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah daerah serta instansi terkait, ditemukan bahwa perbedaan kepentingan ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan operasi teritorial, khususnya di tingkat Kowil jajaran Kodam II/Swj, yakni: pertama, Hambatan yang dihadapi karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar institusi sering kali berakar pada tujuan yang tidak selaras. Dalam banyak kasus, kebijakan di tingkat Provinsi maupun Kota tidak sejalan dengan kebijakan dan tindakan yang ingin dilaksanakan oleh Kowil. Hal ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan operasi, yang semakin diperparah dengan komunikasi yang kurang efektif. Ketidaksiharian ini dapat menciptakan beban tambahan dalam proses koordinasi, di mana pihak Kowil harus melakukan penyesuaian yang tidak cukup mendukung operasional. Observasi menunjukkan bahwa selama rapat koordinasi, keputusan sering kali tidak seragam dan dapat timbul konflik kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat tantangan dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi efektivitas kolaborasi antara Kowil dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidakjelasan dalam tujuan dan prioritas yang harus dicapai dapat merugikan upaya yang telah dilakukan untuk menyegerakan tindakan.

Kedua, Kelemahan Komunikasi dan Ketidakselarasan. Salah satu faktor kunci yang menyebabkan hambatan dalam koordinasi adalah kelemahan dalam komunikasi. Observasi menunjukkan bahwa keterlibatan Kowil dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan tidak selalu optimal. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang program yang dilaksanakan oleh berbagai institusi dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ketidakselarasan antara tujuan Kowil dan program pemerintah daerah menghasilkan konflik internal yang berpotensi menurunkan semangat kolaborasi. Pihak Kowil mungkin merasa terhambat dalam pelaksanaan tugasnya oleh

keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah yang tidak memperhitungkan kondisi di lapangan, sehingga menambah frustrasi dan memperlemah sinergi antara institusi.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rachmawati (2022) yang menekankan bahwa integrasi strategi teritorial dalam operasi gabungan TNI-POLRI dan instansi terkait adalah hal yang sangat vital. Kedua institusi ini memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, integrasi strategi teritorial tidak hanya mencakup aspek militer dan kepolisian, tetapi juga melibatkan berbagai sektor lain seperti pemerintahan daerah, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik ketika melaksanakan operasi teritorial untuk menghindari sekat-sekat yang bisa menghambat efektivitas dan efisiensi tindakan, yaitu: Koordinasi yang Baik sebagai Kunci Keberhasilan. Koordinasi yang baik antara TNI dan POLRI menjadi aspek krusial dalam mencapai tujuan operasional. Menurut doi, dalam situasi yang memerlukan kolaborasi erat, setiap institusi perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas dan aktif. Ketidaksielarasan tujuan dan komunikasi yang lemah dapat menyebabkan kebingungan di lapangan, yang berpotensi menciptakan konflik dan menghambat pergerakan serta respons terhadap situasi yang berkembang. Hal ini menggambarkan pentingnya membangun kerangka kerja yang mendukung koordinasi, yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kedua, Hambatan dari Perbedaan Kepentingan. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, perbedaan kepentingan antar institusi dapat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan operasi teritorial. Berbagai kepentingan yang dimiliki oleh TNI, POLRI, dan instansi lainnya sering kali tidak sejalan, sehingga menciptakan potensi keterbelahan dalam tujuan operasional. Purnomo (2020) menjelaskan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, berbagai agenda individual masing-masing institusi bisa saling bertabrakan, sehingga merugikan misi bersama. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas yang dihadapi oleh instansi di lapangan. Penyesuaian harus dilakukan secara terus-menerus, tetapi tanpa adanya komunikasi yang baik, hal ini sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, mengatasi perbedaan kepentingan dengan menciptakan kesepakatan bersama menjadi langkah yang sangat penting.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka langkah-langkah strategis yang diusulkan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar institusi guna meningkatkan sinergi Kowil dengan instansi terkait adalah : Pertama, Memperkuat Komunikasi. Membangun saluran komunikasi yang lebih efektif antara Kowil dan pemerintah daerah harus menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan reguler yang memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan dan program yang sedang berjalan; kedua, Pembentukan Forum Koordinasi. Menginisiasi forum koordinasi antar institusi yang melibatkan perwakilan dari setiap bidang dapat membantu merespons ketidaksielarasan kebijakan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Forum koordinasi yang melibatkan perwakilan dari TNI, POLRI, instansi terkait, dan pemerintah daerah. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk bernegosiasi tentang perbedaan perspektif dan mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

Ketiga, Penyelarasan Tujuan Program Operasi Teritorial dan Pembangunan Pemda. Melalui diskusi terbuka, semua pihak diharapkan dapat menyelaraskan tujuan program sehingga menghasilkan satu visi yang jelas dalam pelaksanaan operasi teritorial; keempat, Peningkatan Pelatihan, *Workshop* dan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Mengadakan pelatihan bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing dalam koordinasi upaya teritorial dapat meminimalisir konflik kepentingan. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam berkomunikasi dan berkolaborasi juga menjadi sangat penting; kelima, Pembangunan kesadaran peran masing-masing di dalam operasi teritorial pada operasi gabungan TNI. Kesadaran peran masing-masing di dalam operasi teritorial pada operasi gabungan TNI harus ditanamkan melalui pelatihan yang

sistematis. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan setiap stakeholder dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam mencapai tujuan bersama.

### **Keterlibatan Masyarakat yang belum optimal.**

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program Binter (Operasi Teritorial) melalui Bhakti TNI, Komsos maupun Binwanwil Kowil masih jauh dari harapan. Banyak responden mengekspresikan rasa kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi Kowil dimana masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam operasi teritorial yang diselenggarakan Kowil jajaran Kodam II/Swj, mengingat sosialisasi yang dilakukan relatif kurang, sehingga masyarakat merasa terasing dari program-program operasi teritorial yang dijalankan. Observasi di lapangan mengonfirmasi bahwa ada kurangnya interaksi antara aparat Kowil dan masyarakat. Dokumentasi terkait kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa acara yang diadakan tidak cukup banyak dan sasaran audiensnya sering kali tidak tepat. Dengan minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, efektivitas tugas Kowil dalam menyelenggarakan operasi teritorial baik dalam Bhakti TNI, Komsos maupun Binwanwil menjadi kurang mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan program-program yang direncanakan.

Teori Pemberdayaan Masyarakat yang diusulkan oleh Saud A. (2020) menekankan bahwa keberhasilan program-program pemerintah dan organisasi sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai peserta pasif, tetapi sebagai elemen aktif yang memiliki peran penting dalam setiap aspek program yang dijalankan. Dalam konteks ini, kita dapat menarik perhatian pada hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam program Binter (Operasi Teritorial) masih jauh dari harapan, yaitu : pertama, Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat merasa kurang memahami peran dan fungsi Kowil, yang berakibat pada rendahnya partisipasi dalam operasi teritorial.

Menurut teori pemberdayaan, pemahaman yang baik tentang program dan manfaat yang ditawarkan merupakan langkah awal yang penting untuk membangkitkan keterlibatan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak akan merasa memiliki kepentingan terhadap program yang dijalankan, yang mengarah pada apatisme dan ketidakpedulian. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Kowil relatif kurang. Ini mencerminkan kurangnya upaya dari pihak aparat untuk mendekati diri kepada masyarakat. Sosialisasi yang tidak efektif, baik dalam hal frekuensi maupun dalam pemilihan audiens, dapat menyebabkan masyarakat merasa terasing dari program-program yang ditawarkan. Dalam konteks ini, perlu ada strategi yang lebih baik dalam mendekati masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang operasi teritorial.

Kedua, Interaksi yang minim antara aparat Kowil dan Masyarakat. Fakta bahwa interaksi antara aparat Kowil dan masyarakat masih minim juga menjadi kendala besar dalam pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam operasi teritorial. Teori pemberdayaan menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya interaksi yang aktif, masyarakat akan sulit untuk mengungkapkan kebutuhan dan harapan mereka, sementara aparat juga tidak bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat. Minimnya interaksi ini berpotensi menciptakan jarak antara masyarakat dan aparat, yang pada akhirnya mengarah pada kurangnya dukungan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Untuk itu, penting bagi Kowil untuk membuat forum-forum komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi mengenai kebijakan dan program yang ada.

Ketiga, Dampak terhadap efektivitas program Binter. Ketidakefektifan keterlibatan masyarakat dalam program Binter melalui Bhakti TNI, Komsos, maupun Binwanwil Kowil

berdampak langsung pada efektivitas tugas Kowil dalam melaksanakan operasi teritorial. Menurut teori pemberdayaan, keberhasilan suatu program sangat tergantung pada dukungan dari masyarakat. Program yang tidak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak akan berjalan dengan baik. Dari data yang terkumpul, terlihat bahwa tanpa adanya dukungan masyarakat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi sulit untuk dicapai. Ketidakhahaman masyarakat tentang peran dalam proses ini menciptakan kesenjangan yang menghambat perkembangan program. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih inklusif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap program.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, B. (2021) dengan judul "Strategi Kolaborasi TNI dan Masyarakat dalam Operasi Teritorial di Wilayah Konflik" memberikan perspektif penting tentang pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam konteks operasi teritorial di wilayah konflik. Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan program-program operasi teritorial yang dijalankan oleh Kowil. Prasetyo menunjukkan bahwa kolaborasi yang erat antara TNI dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program-program di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan setiap upaya pemrograman yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi. Untuk mengoptimalkan kolaborasi tersebut, Prasetyo menyoroti beberapa strategi kunci. Pertama, sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program-program operasi teritorial. Kedua, membangun komunikasi yang lebih baik antara TNI dan masyarakat dapat memfasilitasi pertukaran informasi, umpan balik, dan koordinasi yang lebih baik. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen masyarakat terhadap keberhasilan program.

Implikasi dari penelitian Prasetyo adalah bahwa TNI perlu terus mengembangkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif dalam operasi teritorial di wilayah konflik. Dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi, dan partisipasi aktif, efektivitas operasional program dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya akan membantu mencapai tujuan program secara lebih efektif, tetapi juga dapat membangun kepercayaan dan legitimasi TNI di mata masyarakat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan tantangan dan kompleksitas yang melekat dalam melibatkan masyarakat di wilayah konflik. Faktor-faktor seperti dinamika konflik, fragmentasi sosial, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang peka terhadap konteks dan adaptif diperlukan dalam merancang dan melaksanakan strategi kolaborasi.

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam operasi teritorial yaitu : pertama, Peningkatan Sosialisasi. Perlu ada upaya untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi tentang program-program Kowil. Ini termasuk penggunaan berbagai media dan metode yang sesuai dengan konteks lokal agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat; kedua, Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Program Operasi Teritorial. Mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan program Operasi Teritorial akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan komitmen terhadap program yang dijalankan; ketiga, Membangun Forum Partisipatif. Membentuk forum diskusi yang melibatkan aparat Kowil dan masyarakat akan menciptakan ruang untuk saling bertukar pandangan dan informasi. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang belum terpenuhi; keempat, Program Edukasi dan Pelatihan. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai peran serta fungsi mereka dalam mendukung program-program yang ada, sehingga masyarakat lebih siap dan mampu untuk berpartisipasi secara aktif.



## KESIMPULAN

Pelatihan yang terstruktur dan efektif merupakan faktor kritis dalam meningkatkan kinerja personel TNI, terutama dalam konteks operasi teritorial pada operasi gabungan TNI. Keterbatasan sumber daya di Kowil dapat diatasi melalui pendekatan manajemen SDM yang strategis, serta penerapan inovasi dalam program pelatihan. Dengan melakukan ini, Kowil akan lebih siap dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi secara optimal, sehingga dampak positif dari setiap pelatihan dapat dirasakan langsung di lapangan.

Koordinasi yang baik dan pengelolaan perbedaan kepentingan adalah elemen kunci untuk mencapai keberhasilan dalam operasi teritorial. Melalui langkah-langkah yang strategis dalam memperbaiki komunikasi, menyelaraskan tujuan, dan membentuk forum koordinasi, Kowil bersama dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan sinergi yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada efektivitas dan keberhasilan operasi teritorial. Ini bukan hanya tentang menjalankan tugas secara individu, tetapi lebih kepada pencapaian gambar besar yang menguntungkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.

Keterlibatan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan program-program operasi teritorial yang dijalankan oleh Kowil. Dengan mengoptimalkan sosialisasi, membangun komunikasi yang lebih baik, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, diharapkan efektivitas operasional program dapat meningkat. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan landasan bagi pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan setiap upaya pemrograman yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi.

## REFERENSI

- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page.
- Bennett, A., & Elman, C. (2006). *Complex Adaptive Systems and the Study of International Relations*. *International Organization*, 61(2), 393-433.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Saud, A. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Operasi Kemanusiaan: Perspektif TNI*. *Jurnal Sosial dan Politik*.
- Setiawan, M. (2020). *Efektivitas Pelatihan Aparat TNI dalam Operasi Kemanusiaan*. *Jurnal Manajemen Pertahanan*.
- Siti, R. (2021). *Strategi Komunikasi Sosial dalam Operasi Teritorial TNI*. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 10(2), 112-130.
- Purnomo, E. D. (2020). *Strategi Kolaborasi Antar-Instansi dalam Penanganan Masalah Sosial di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Purnomo, E. D. (2020). *Strategi Kolaborasi Antar-Instansi dalam Penanganan Masalah Sosial di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Prasetyo, B. (2021). *Strategi Kolaborasi TNI dan Masyarakat dalam Operasi Teritorial di Wilayah Konflik*. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*.
- Rachmawati, L. (2022). *Integrasi Strategi Teritorial dalam Operasi Gabungan TNI-POLRI*. *Jurnal Administrasi Keamanan Nasional*.
- Rachmawati, A. (2020). *Peran Masyarakat dalam Operasi Bhakti TNI*. *Media Informasi Pertahanan*, 15(1), 45-61.
- Yudho, S. & Arifin, M. (2022). *Implementasi Teknologi Informasi dalam Operasi Teritorial TNI*. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 13(3), 75-90